

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 680-686

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15732749>

Evaluasi Kebijakan Ekonomi Publik Dalam Mendorong Pertumbuhan Inklusif di Indonesia

Allam Tri Mufadhol, Angelika Afandi, Daffa Muhammad Supriyatna, Ghaelan Haerudin Al Anbari, Sitta Dewi, Pribadi Bentang Tauladan, Dian Herdiana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mufadholallamtri@gmail.com, angelikaafandi82@gmail.com, daffacube@gmail.com, ghaelannn@gmail.com, dewisitta7@gmail.com, abenbentang24@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan tujuan strategis pembangunan di Indonesia untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi publik Indonesia dalam mendorong pertumbuhan inklusif selama periode 2014–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan data primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan kajian literatur. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan fiskal, sistem perpajakan, reformasi subsidi, serta desentralisasi fiskal telah mengalami berbagai kemajuan, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan alokasi anggaran, ketidakefisienan birokrasi, kelemahan dalam administrasi perpajakan, dan disparitas pembangunan antarwilayah. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial mulai menunjukkan arah positif dalam mengurangi kemiskinan, namun masih memerlukan perbaikan dalam akurasi data dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan perencanaan berbasis data, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas daerah sebagai strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan, Ekonomi, fiskal

Abstract

Inclusive economic growth is a strategic goal of development in Indonesia to ensure that the benefits of economic growth can be felt evenly by all levels of society. This study evaluates the effectiveness of Indonesia's public economic policies in promoting inclusive growth during the period 2014–2024. The study uses a descriptive qualitative approach relying on primary data from interviews and secondary data from policy documents, official reports, and literature reviews. The findings show that although fiscal policy, taxation systems, subsidy reforms, and fiscal decentralization have made various advances, their implementation still faces challenges in the form of budget allocation inequality, bureaucratic inefficiencies, weaknesses in tax administration, and disparities in development between regions. Subsidy and social protection reforms have begun to show positive directions in reducing poverty, but still require improvements in data accuracy and coordination between institutions. This study recommends data-based planning, strengthening governance, and increasing regional capacity as strategies to strengthen equitable and sustainable economic growth.

Keywords: Policy, Economy, Fiscal

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menjadi tujuan strategis bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, serta distribusi manfaat pertumbuhan yang belum merata antar wilayah dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi publik memainkan peran sentral dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi publik, seperti program perlindungan sosial, subsidi, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur

yang bertujuan untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan produktivitas di berbagai daerah. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana instrumen-instrumen tersebut berhasil mendorong pertumbuhan yang bersifat inklusif—yakni pertumbuhan yang mampu mengurangi kemiskinan, mempersempit ketimpangan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok marjinal.

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan ekonomi publik yang telah diterapkan di Indonesia dalam mendukung agenda pertumbuhan inklusif. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi publik yang telah diterapkan di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks, implementasi, dan dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat dan wilayah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat sipil. Data sekunder mencakup dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah (seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPS), serta studi-studi sebelumnya yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik, di mana data dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan terhadap dimensi pertumbuhan inklusif, seperti:

- Pengurangan kemiskinan
- Penurunan ketimpangan pendapatan
- Peningkatan akses terhadap layanan dasar
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal

Hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan indikator pertumbuhan inklusif yang diadopsi dari lembaga-lembaga internasional (misalnya OECD atau UNDP), serta tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kebijakan ekonomi publik yang diimplementasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2014–2024) dan fokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan tinggi, guna menilai relevansi dan keberhasilan kebijakan dalam konteks yang paling membutuhkan pertumbuhan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal dan Alokasi Anggaran

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi negara, yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan fiskal dilakukan melalui pengumpulan pendapatan negara—terutama dari sektor perpajakan—dan belanja negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menetapkan fokus anggaran pada bidang-bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Anggaran yang dialokasikan secara signifikan untuk sektor pendidikan dan infrastruktur mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat konektivitas antardaerah. Namun demikian, hasil dari alokasi ini belum sepenuhnya merata. Beberapa kajian mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sering kali tidak disesuaikan dengan

kebutuhan spesifik daerah, sehingga wilayah yang tertinggal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Sistem alokasi yang bersifat top-down juga dinilai kurang mampu merespons secara efektif tantangan dan karakteristik lokal.

Untuk memperkecil ketimpangan fiskal antarwilayah, pemerintah mengembangkan skema Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa. Dana Desa, sebagai salah satu inisiatif utama, diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan dan memperkuat keadilan antarwilayah. Sayangnya, pelaksanaan program ini sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas pengelolaan di tingkat desa. Banyak desa masih belum memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik dan akuntabel, sehingga efektivitas penggunaan anggaran belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, struktur belanja negara masih didominasi oleh belanja rutin seperti gaji pegawai dan biaya operasional birokrasi, sementara porsi belanja produktif relatif kecil. Kondisi ini membatasi ruang fiskal untuk pembiayaan program-program pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, agar pembangunan lebih inklusif, belanja negara seharusnya lebih diarahkan pada pengembangan kapasitas produksi lokal, mendorong inovasi daerah, serta memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal Indonesia masih memerlukan berbagai penyempurnaan, khususnya dalam hal perencanaan berbasis kinerja dan evaluasi yang transparan. Pendekatan yang berbasis data serta melibatkan partisipasi masyarakat perlu diperkuat, agar pengalokasian anggaran tidak hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

Sistem perpajakan dan ketimpangan fiskal

Sistem perpajakan adalah seperangkat aturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh Negara dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, termasuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Teori Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena yang mencerminkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut teori ekonomi klasik, ketimpangan muncul sebagai hasil dari mekanisme pasar bebas yang kompetitif, di mana distribusi kekayaan sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas individu atau kelompok tertentu (Fahmi, 2019). Namun, pandangan teori ekonomi modern mengkritisi pendekatan ini dengan menekankan bahwa ketimpangan yang ekstrem justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya (Nusiantari & Swasito, 2020; Kristanto, 2023).

Kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Dua komponen utama kebijakan ini, yakni perpajakan dan pengeluaran pemerintah, dapat diarahkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Salah satu strategi yang paling umum digunakan adalah penerapan pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan naiknya tingkat pendapatan. Pendekatan ini dianggap efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial (Zulma, 2020).

Pengeluaran Publik dan Transfer Sosial

Pengeluaran publik, khususnya yang ditujukan untuk layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, memegang peranan penting dalam mengurangi ketimpangan di negara-negara berkembang. Berdasarkan teori pengeluaran publik, alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Nusiantari dan Swasito (2020) menyatakan bahwa program sosial pemerintah, seperti subsidi pendidikan, memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

Namun demikian, keberhasilan pengeluaran publik sangat bergantung pada efisiensi alokasi anggaran dan tata kelola yang transparan. Fahmi (2019) menekankan bahwa praktik ketidaktransparanan dan korupsi dalam administrasi publik dapat mengurangi efektivitas kebijakan pengeluaran, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan anggaran

publik sangat diperlukan agar pengeluaran sosial benar-benar dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan (Widiarti & Subekti, 2022; Zulma, 2020).

Efisiensi Administrasi Perpajakan

Efisiensi administrasi perpajakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan fiskal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Sistem perpajakan yang efisien harus mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menambah beban yang berlebihan bagi wajib pajak. Kristanto (2023) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, baik melalui pelatihan sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi, dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.

Penerapan teknologi seperti sistem *e-filing* dan *e-payment* terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menurunkan biaya administrasi (Imtiyazari, 2023). Di samping itu, kampanye kesadaran pajak yang efektif turut memperkuat peran fiskal dalam redistribusi pendapatan (Nusiantari & Swasito, 2020). Edukasi perpajakan yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan perpajakan turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila sistem pajak dinilai adil dan transparan (Imtiyazari, 2023). Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi dan reformasi kelembagaan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung kebijakan fiskal yang inklusif (Nusiantari & Swasito, 2020).

Reformasi subsidi dan program perlindungan sosial

Subsidi dan perlindungan sosial memiliki peranan vital dalam menciptakan pemerataan dan menurunkan angka kemiskinan. Di Indonesia, subsidi—terutama dalam sektor energi—telah lama menjadi bagian dari strategi pemerintah. Namun, implementasinya sering kali kurang tepat sasaran dan menjadi beban besar bagi APBN. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan subsidi sangat diperlukan agar dana negara dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Selama bertahun-tahun, subsidi seperti BBM, listrik, dan pupuk ditujukan untuk mendukung masyarakat kurang mampu. Namun, kenyataannya, sebagian besar bantuan ini justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Berdasarkan berbagai kajian, sekitar 70% subsidi energi dinikmati oleh kelompok kaya. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi belum optimal mendukung kelompok rentan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah mulai melakukan penyesuaian dan reformasi subsidi dengan tujuan mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang lebih produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat miskin.

Ketimpangan wilayah dan peran desentralisasi

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih menjadi persoalan utama dalam upaya pemerataan kesejahteraan nasional. Hal ini terlihat dari disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara wilayah barat dan timur Indonesia. Sebagai ilustrasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa IPM DKI Jakarta mencapai 80,83, sementara Papua hanya sebesar 60,97. Ketimpangan ini juga tercermin dari perbedaan tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita di Jakarta sekitar Rp18,5 juta, sedangkan di Papua hanya sekitar Rp6 juta (BPS, 2023). Beberapa faktor utama penyebab ketimpangan antarwilayah di Indonesia meliputi:

a. Ketidakmerataan Infrastruktur dan Investasi

Wilayah barat Indonesia, terutama Pulau Jawa, memang memiliki infrastruktur dan akses pasar yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah timur. Daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua menghadapi keterisolasian ekonomi akibat minimnya akses jalan, pelabuhan, dan logistik. Kondisi ini menyebabkan biaya distribusi barang dan jasa di wilayah timur menjadi sangat tinggi dan menurunkan daya saingnya. Data menunjukkan bahwa Pulau Jawa mendominasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, sementara Papua dan Maluku mencatat pembangunan terendah, khususnya pada infrastruktur dasar seperti air dan listrik. Ketimpangan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat arus investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

b. Konsentrasi Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh provinsi di Jawa dan Sumatera. Selama beberapa dekade terakhir, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Barat Indonesia (KBI) tidak pernah kurang dari 80% terhadap PDB nasional, sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tertinggal jauh. Data BPS menunjukkan Pulau Jawa menyumbang sekitar 59% PDB nasional, Sumatera 21,14%, sementara Maluku dan Papua masing-masing hanya sekitar 3,06% dan 2,27%. Ketimpangan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh distribusi sumber daya alam dan manusia yang tidak merata serta pengelolaan yang kurang efektif.

c. Urbanisasi dan Keterbatasan Konektivitas

Urbanisasi yang terkonsentrasi di wilayah barat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penyediaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Lemahnya konektivitas antarwilayah, terutama di kawasan timur, memperkuat efek "growth pole", di mana pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di daerah tertentu dan tidak menyebar secara merata. Keterbatasan infrastruktur transportasi, seperti jalan dan pelabuhan, di Maluku dan Papua misalnya, menyebabkan kawasan-kawasan potensial tetap terisolasi dan sulit berkembang.

d. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Daerah

Perbedaan potensi sumber daya manusia dan alam, serta kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, menyebabkan kemampuan pembangunan yang tidak merata. Daerah tertinggal sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, namun dana ini sering kali hanya digunakan untuk belanja rutin, bukan untuk pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan dipengaruhi oleh distribusi sumber daya yang tidak merata dan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan, sehingga pembangunan di kawasan timur terus tertinggal dibandingkan kawasan

Desentralisasi, terutama dalam bentuk desentralisasi fiskal, memegang peranan penting dalam menekan ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Ketimpangan wilayah sendiri merujuk pada perbedaan tingkat pembangunan, kesejahteraan, serta akses terhadap layanan publik di berbagai daerah, yang hingga kini masih menjadi isu utama di Indonesia. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, keuangan, dan proses pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan fiskal dan pembangunan antara pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri. Dengan adanya transfer dana dari pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini memungkinkan daerah tertinggal untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal berperan dalam menurunkan ketimpangan antarwilayah. Sebagai ilustrasi, studi di Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa peningkatan rasio desentralisasi fiskal sebesar 1% dapat mengurangi ketimpangan antarkabupaten/kota sebesar 0,006 poin, dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Selain itu, riset di Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan bahwa setelah penerapan desentralisasi fiskal, terjadi konvergensi pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman, yang menandakan kecenderungan penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, efektivitas desentralisasi dalam mengurangi ketimpangan wilayah sangat bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah. Banyak daerah, khususnya yang tertinggal, masih menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas aparatur, perencanaan, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, sebagian besar dana transfer dari pusat masih digunakan untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, bukan untuk pembangunan ekonomi produktif. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat juga masih tinggi, terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

Selain itu, keterlibatan elit lokal dalam proses pengambilan keputusan fiskal terkadang dapat menghambat tercapainya pemerataan hasil pembangunan. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap

penggunaan anggaran menjadi sangat krusial agar desentralisasi benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Secara umum, desentralisasi fiskal telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan ketimpangan antarwilayah di Indonesia, meskipun masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Agar peran desentralisasi dapat lebih optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan kebijakan fiskal yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan ekonomi publik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Kebijakan fiskal belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lokal dan masih didominasi oleh belanja rutin. Sistem perpajakan progresif dan modernisasi administrasi telah diterapkan, namun masih terdapat ruang untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi. Reformasi subsidi energi dan penguatan program perlindungan sosial memberikan dampak positif bagi kelompok rentan, tetapi efektivitasnya masih terkendala oleh kelemahan validasi data dan resistensi masyarakat. Ketimpangan antarwilayah juga tetap menjadi persoalan serius akibat ketidakseimbangan infrastruktur dan konsentrasi pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antarlembaga, peningkatan kapasitas daerah, serta kebijakan berbasis data dan partisipatif guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- Arifianto, A. (2018). "Kebijakan Fiskal di Indonesia: Tinjauan Kritis dan Rekomendasi." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*, 12(1).
- Bappenas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>
- Bappenas. (2021). *Laporan Evaluasi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- Fahmi, I. (2019). Ekonomi Publik: Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- IIGF Institute. 2023. Bersama Memajukan Indonesia Timur. Jakarta: IIGF Institute.
- Imtiyazari, S. (2023). Efektivitas Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Administrasi Fiskal, 11(1).
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *APBN Kita: Realisasi dan Outlook Anggaran Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Keuangan RI. 2023. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Antar Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- OECD. (2021). OECD Economic Surveys: Indonesia 2021. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2021-en
- Sari, D. 2021. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan (JIMEK), 7(2).
- SJR. 2022. Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. Jakarta: SJR

- UIN Jakarta. 2022. Pengaruh Infrastruktur Jalan, Air, dan Listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta: UIN Jakarta.
- Universitas Sam Ratulangi. 2022. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan di Kawasan Timur Indonesia. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Prakarsa, Y. (2019). *Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Pemerataan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik.
- Wicaksono, A., & Yani, E. (2020). "Efektivitas Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2).